

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, H, 2015, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta.
- Alting, Husen, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Arifin, Firdaus, 2019, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta.
- Damanik, E. L, 2023, *Tolu sahundulan & lima saodoran: Struktur dan fungsi kekerabatan triangular dan pentagonal Simalungun*, Medan: Simetri Institute.
- Damanik, Djahutar, 2019, *Jalannya hukum adat Simalungun* (E. L. Damanik, Ed.), Medan: Simetri Institute.
- Fajar ND, Mukti, and Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gusman, Delfina, dan Yunita Syofyan, 2021, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadi , dan Waskito Arnowo, 2017, *Pertanahan Agraria dan Tata Ruang*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Harsono, B, 2008, *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya (Cet. ke-9)*, Jakarta: Djambatan.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Lubis, Suwandi, 1987, *Metodologi Penelitian Sosial*, Medan: USU Press.
- Nova, Nurwati, Monaya, dan Rizal Syamsul Ma'arif, 2024, *Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta: Karya Bakti Makmur Indonesia.
- Nurdin, Ismail, 2017, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan*, Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books.
- Muhammad, Bushar, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Santoso, Urip, 2006, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media Group.

- Sapto, Sigit, Nugroho, et. al, 2017, *Hukum Agraria Indonesia*, Solo: Pustaka litizam.
- Simarmata, Rikardo, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Bangkok: UNDP Regional Centre.
- Suratman, Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Suteki, Taufani Galang, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, 1st ed, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soemardjono, Maria SW, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Waskito, dan Arnowo, H, 2017, *Pertanahan agraria dan tata ruang*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Aceh: Unimal Press.
- Zainudin, Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- B. Peraturan Perundang - Undangan**
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, 2007.
- Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat.
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Hak Pengelolaan.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Pengelolaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-V/2007 tentang Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas wilayah adat.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, Nomor 192/PK/TUN/2024. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, Nomor 6K/TUN/2024. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, 2023, Nomor 87/B/2023/PT.TUN.MDN Medan: PT.TUN Medan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, 2022, Nomor 143/G/2022/PTUN.MDN. Medan: PTUN Medan.

D. Skripsi & Jurnal

Ayunda, Lathifa, et al, 2024, “Konsep Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia”, Customary Law Journal, Vol 1, No.2.

Bandjar, Muhaimin Bahriansyah, Josina Augustina Yvonne Wattimena, and Wilshen Leatemala, 2024, “Urgensi Ratifikasi International Labour Organization 169 Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 4.

Barnasaputri, Ikhana Indah, 2021, “Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan yang Belum Selesai”, Notaire, Vol 4, No. 1.

Catur, Slamet, Pamungkas, 2021, “*Transformasi UU Agraria Tahun 1870 ke UUPA Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia,*” Al-Isnad Journal of Islamic Civilization History and Humanities.

Earlene, Felishella, and Tundjung Herning Sitabuana, 2024, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM”, Tunas Agraria, Vol. 7, No. 2.

Fahlevi, K., Warman, K., & Nurdin, Z, 2023, “Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh PT. PLN (Persero) di Riak Danau Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.” UNES Law Review, Vol. 6, No. 1.

- Latif, Udin, 2021, “Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar Tambang” , National Journal of Law, Vol.4, No. 1.
- Laturette, Adonia, Ivonne, 2016, “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Sasi, Vol. 22, No. 2.
- Martinesya, Sefa, 2020, “Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat” , Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1.
- Pieter, Vally A, 2013, “Pemahaman Hak-Hak Tanah Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria” , Karya Ilmiah, Faculty of Law Pattimura.
- Sahara, A. R. R., & Susanto, C. A, 2023, “Eksistensi hukum adat dalam mempertahankan kearifan lokal di era modern”, MOTOKAR, Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur, Vol. 1, No. 2.
- Sapetra, E, Siburian, Anggiat Sinurat, dan Bongguk Haloho, 2023, “Multikulturalisme Masyarakat di Kota Pematangsiantar: Suku, Agama dan Budaya,” Jurnal Pendidikan Mandala, Vol. 8, No. 1.
- Sembiring, R, 2014, Pandangan kritis tentang penyelesaian sengketa hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan nasional (Studi di Kabupaten Simalungun) (Disertasi doktor, Universitas Sumatera Utara).
- Taqwaddin, 2010, “Penguasaan atas pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat (Mukim) di Provinsi Aceh,” (Disertasi doktor, Universitas Sumatera Utara).
- Tumbel, Zidane, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”, Lex Et Societatis, Vol. 8, No. 1.
- Togatorop, Marulak, Moh. Hardiansyah, and Dawam Muzak, 2021, “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat yang Masuk Dalam Kawasan Hutan (Legal Certainty of Land Rights For Indigenous People That Is Included in The Forest Area)” , Jurnal Hukum, Vol.12, No.2.
- Yuwono, Dandung Budi, 2018, “Reproduksi Multikulturalisme di Tengah Pluralitas Masyarakat Batak: Kekhasan Pada Masyarakat Pematang Siantar Sumatera Utara”, Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol.17, No.2.

E. Internet

- Antaranews, <https://www.antaranews.com/berita/4958049/komnas-ham-luncurkan-snp-pelindungan-hak-masyarakat-adat>

Agus, Eko Harianto, Konflik Agraria di Pematangsiantar, anggota Futasi jadi korban, <https://sumut.idntimes.com/news/sumatera-utara/konflik-agraria-di-pematang-siantar-anggota-futasi-jadi-korban-00-cp4lt-9kjvp9>

Arianto, Henry, dan Nin Yasmine Lisasih,
<https://www.studocu.id/id/document/universitas-gadjah-mada/hukum-adat-dalam-yurisprudensi/masyarakat-hukum-adat-resume/69751823>

Bappeda Kota Pematangsiantar,
<https://bappeda.pematangsiantar.go.id/halaman/detail/visi-misi>

BPK RI SUMUT, <https://sumut.bpk.go.id/kota-pematangsiantar/>

Imron, Muhammad, Sejarah asal-usul kota Pematangsiantar,
<https://www.kuwaluhan.com/2019/01/sejarah-asal-usul-kota-pematangsiantar.html>

Juraidi, Ini pentingnya Perda Masyarakat Adat menurut Ketua DPRD Sumut,
<https://sumut.antaranews.com/berita/578703/ini-pentingnya-perda-masyarakat-adat-menurut-ketua-dprd-sumut>

Kumparan, Pengertian Hak Menurut Ahli dan Contohnya Dalam UUD 1945,
<https://m.kumparan.com/amp/kabar-harian/pengertian-hak-menurut-ahli-dan-contohnya-dalam-uud-1945-2375lrqwoSn>

Komnas HAM, Komnas HAM Ingatkan Pentingnya Pemenuhan HAM Masyarakat Adat,
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/6/15/2154/komnas-ham-ingatkan-pentingnya-pemenuhan-ham-masyarakat-adat.html>

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 10 Provinsi Pencetak Konflik Agraria,
<https://www.kpa.or.id/2024/01/28/10-provinsi-pencetak-konflik-agraria-tertinggi-versi-kpa/>

Patricia, j, Jangan Pupus: Desak Pengesahan RUU Masyarakat Adat,
<https://kumparan.com/whata-npc/jangan-pupus-desak-pengesahan-ruu-masyarakat-adat-23gAKsgmbI3/4>

Purba, S, Tidak ada tanah ulayat di Simalungun, tanah dikuasai tujuh kerajaan.
<https://www.armadanews.id/2025/03/24/dr-sarmedi-purba-tegaskan-di-simalungun-tanah-dimiliki-tujuh-kerajaan-simalungun-jadi-tidak-ada-tanah-adat-ulyat/>

Profil Pelajar,
<https://profilpelajar.com/Daftar-kecamatan-dan-kelurahan-di-Kota-Pematangsiantar>

Pemerintah Kota Pematangsiantar, About,
<https://pematangsiantar.go.id/about>.

RRI, Adat Batak Simalungun Etnis Nusantara Babel Nauli,
<https://rri.co.id/bangka-belitung/daerah/1164639/adat-batak-simalungun-etnis-nusantara-babel-nauli>,

Sapto, Sigit Nugroho, Persekutuan Genealogis Teritorial, https://123dok.com/article/persekutuan-genealogis-teritorial-tata-susunan-rakyat-di-indonesia.qm82grwz#google_vignette

Simangunsong, Ingot, Pematangsiantar Raih Peringkat 5 Kota Toleran, Wali Kota: Kerukunan umat beragama sudah mengakar sejak lama,
<https://www.segaris.co/2025/06/13/pematangsiantar-raih-peringkat-5-kota-toleran-wali-kota-kerukunan-umat-beragama-sudah-mengakar-sejak-lama/>

Sumut IDN Times, Konflik Agraria di Pematang Siantar, Anggota Futasi Jadi Korban,
<https://sumut.idntimes.com/news/sumut/eko-agus-herianto/konflik-agraria-di-pematang-siantar-anggota-futasi-jadi-korban>

Sumut, Konflik Agraria di Siantar,
<https://sumut.idntimes.com/news/sumut/eko-agus-herianto/konflik-agraria-di-pematang-siantar-anggota-futasi-jadi-korban>

Syaiful, Apa itu Hak Asasi Manusia?,
<https://hukum.uma.ac.id/2020/09/17/apa-itu-hak-asasi-manusia/>

Studocu, Masyarakat Hukum Adat (Resume)
<https://www.studocu.com/id/document/universitas-gadjah-mada/hukum-adat-dalam-yurisprudensi/masyarakat-hukum-adat-resume/69751823>

F. Wawancara

Wawancara dengan Ibuk Erwinawaty, SH (Sekretaris Lurah Bah Sorma),
pada tanggal 14 April 2025

Wawancara dengan Bapak H. Purba, Pada tanggal 14 April 2025

Wawancara dengan Ibu S. Damanik, Pada tanggal 14 April 2025

Wawancara dengan Ibu Herlina (Wakil Walikota Pematangsiantar), pada
tanggal 11 April 2025

Wawancara dengan Bapak Chairuddin Lubis (Anggota DPRD komisi III Kota
Pematangsiantar), pada tanggal 13 April 2025